

Puluhan Mobil Dinas Diajukan Dum

PONTIANAK—Puluhan mobil dinas diajukan dum sepanjang 2010 hingga 2011. Tetapi belum satu pun yang diproses hingga saat ini, karena masih dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

"Hingga sekarang belum ada yang diproses. Kita sedang diperiksa BPK, mana yang boleh didum ataupun yang tidak," ujar Pelaksana Harian (Plh) Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Kartius di Grand Mahkota Hotel, Selasa (11/9).

Menurut Kartius, sudah lama tidak ada proses dum di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar. Terakhir dari 2005 ke

2010. Proses dum harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dum salah satunya mobil dinas minimal berusia delapan. Jika kurang dari delapan tahun, pengguna pensiun dan masih ada pejabat lain yang menggunakannya, mobil harus dikembalikan. "Karena kita masih kekurangan mobil. Jika ada yang mengatakan mobilnya ditarik, mengapa yang

lain tidak, itu sesuai ketentuan. Yang diatas 8 tahun



bisa didum," jelas Kartius.

• ke halaman 15 kolom 1

Puluhan Mobil Dinas Diajukan Dum

Sambungan dari halaman 9

Tak hanya penertiban mobil dinas, Pemerintah Propinsi Kalbar juga menertibkan rumah dinas. Saat ini, lanjut Kartius, empat rumah dinas sudah dikembalikan mantan pejabat yang menghuninya kepada pemerintah. Tersisa satu rumah, yakni milik Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang belum dikembalikan.

"Hanya satu yang belum dikembalikan. Tidak ada lagi karena rumah dinas propinsi terbatas.

Untuk rumah dinas golongan III, sudah lama kita tidak membangun," kata Kartius.

Dalam temuan BPK RI, terdapat sedikitnya 92 rumah dinas yang belum lunas. Sebelumnya rumah menjadi aset Pemprov, kemudian dilakukan dum.

Setelah proses dum ram-

pung, pembayarannya belum dilunaskan hingga saat ini. Saat dikonfirmasi, Kartius membenarkan adanya temuan rumah dinas yang belum lunas tersebut.

"Yang belum lunas itu, kita panggil dulu baru disurati. Karena ada beberapa teman yang pensiun dan penghasilannya terbatas," kata Kartius.

Menurut Kartius, masa pelunasan rumah dinas yang didum adalah 15 sampai 20 tahun. Saat ini masa waktu pelunasan habis, tetapi masih ada yang menunggak. Pemerintah Provinsi Kalbar tetap menagih.

"Kita mengerti juga. Karena sebelumnya penghasilan 100 persen, setelah pensiun hanya terima 75 persen. Tetapi tetap ditagih. Ada yang sudah meninggal, tetapi ahli warisnya masih ada," ungkapnya. (uni)